

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah salah satu unsur yang dapat dikatakan penting karena kajian pustaka menjadi pondasi utama mengapa peneliti memutuskan untuk memilih permasalahan atau judul tertentu. Tinjauan kajian pustaka juga dapat dikatakan sebagai pondasi dasar untuk cakupan pekerjaan referensi. Secara global, tinjauan pustaka terbagi dari beberapa bagian yang memaparkan mengenai teori-teori, temuan dan hasilnya yang berguna menjadi bahan penelitian, yang selanjutnya menjadi dasar dari penelitian yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya peneliti dimulai dengan mencari informasi yang merujuk dengan topik atau judul yang diteliti. Langkah ini merupakan metode yang harus diperhatikan dengan serius karena peneliti mendapatkan informasi atau sumber yang berkaitan untuk penelitiannya. Oleh sebab itu, dalam melakukan penulisan skripsi peneliti perlu melakukan tinjauan pustaka yang berlandaskan dari beberapa sumber.

2.1.1 Budaya Organisasi

2.1.1.1 Pengertian Budaya Organisasi

Penggunaan istilah budaya organisasi dengan mengacu pada budaya yang berlaku dalam perusahaan, karena pada umumnya perusahaan itu dalam bentuk organisasi, yaitu kerjasama antara beberapa orang yang membentuk kelompok atau satuan kerjasama tersendiri. Studi yang dilakukan ini mengenai budaya organisasi yang berlaku pada perusahaan. dalam pembicaraan selanjutnya yang disebut budaya organisasi diartikan atau sinonim dengan budaya perusahaan. jika disebut budaya perusahaan, diartikan pula budaya yang berlaku dalam organisasi yang melakukan kegiatan perusahaan. jadi, istilah budaya organisasi dan istilah budaya perusahaan dalam studi ini juga seperti yang digunakan para pencipta saling mengganti. (Sutrisno, 2019)

Menurut Sutrisno (2019) menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah sebagai berikut :

“Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah-masalah organisasinya”.

Menurut Astuti (2022) memaparkan bahwa budaya organisasi adalah sebagai berikut :

“Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka menyesuaikan diri dengan masalah masalah eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik serta dianggap berharga dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang benar untuk menyadari, berpikir dan merasakan hubungan dengan masalah tersebut”.

Menurut Hasanah & Aima (2018) dalam Putri & Yusuf (2022) mendefinisikan bahwa budaya organisasi adalah sebagai berikut :

“Budaya organisasi menjadi suatu pola dasar diciptakan, ditemukan atau dikembangkan sang gerombolan eksklusif ketika belajar menghadapi kasus adaptasi eksternal dan integrasi internal sudah berjalan relatif baik buat dipercaya valid dan sang lantaran itu, buat diajarkan pada anggota baru menjadi cara buat berpersepsi, berfikir dan berperasaan sehubungan menggunakan kasus yang dihadapinya”.

Menurut Alhempy et al. (2024:4) menjelaskan bahwa Budaya Organisasi adalah sebagai berikut :

“Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, norma dan kebiasaan yang diterima dan diterapkan oleh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari”.

2.1.1.2 Tujuan Budaya Organisasi

Menurut Sutrisno (2019:2–3) budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan, sebaliknya yang lemah atau negatif menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut dan diperjuangkan oleh Sebagian besar para anggota organisasi (karyawan perusahaan). Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan antara lain sebagai berikut :

1. Nilai-nilai kunci yang sangat menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai pada para anggota dan merupakan kekuatan yang tidak tampak.
2. Perilaku-perilaku karyawan secara tak disadari terkendali dan terkoordinasi oleh kekuatan yang informal atau tidak tampak.

3. Para anggota merasa komit dan loyal pada organisasi.
4. Adanya musyawarah dan kebersamaan atau kesertaan dalam hal-hal yang berarti sebagai bentuk partisipasi, pengakuan dan penghormatan terhadap karyawan.
5. Semua kegiatan berorientasi atau diarahkan kepada misi atau tujuan organisasi.
6. Para karyawan merasa senang karena diakui dan dihargai martabat dan kontribusinya yang sangat *rewarding*.
7. Adanya koordinasi, integrasi dan konsistensi yang menstabilkan kegiatan-kegiatan perusahaan.
8. Berpengaruh kuat terhadap organisasi dan tiga aspek, pengarahannya perilaku dan kinerja organisasi, penyebarannya pada para anggota organisasi dan kekuatannya, yaitu menekan para anggota untuk melaksanakan nilai-nilai budaya.
9. Budaya berpengaruh terhadap perilaku individual maupun kelompok.

2.1.1.3 Fungsi Budaya Organisasi

Menurut Astuti (2022) budaya organisasi memiliki beberapa fungsi didalam suatu organisasi, diantaranya :

1. Budaya memiliki suatu peran dalam batas-batas penentu, yaitu menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.

2. Budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi.
3. Budaya mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas melebihi batasan ketertarikan individu.
4. Budaya mendorong stabilitas sistem sosial budaya merupakan suatu iklan sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan karyawan.
5. Budaya bertugas sebagai pembentuk perilaku serta sikap karyawan.

2.1.1.4 Konsep Budaya Organisasi

Menurut Sutrisno (2019:4–7) budaya organisasi adalah suatu konsep yang sangat bervariasi, terbukti dari adanya sekian banyak definisi yang sangat berbeda-beda yang dapat ditemukan dalam kepustakaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai pandangan, pendekatan, minat masing-masing yang berkepentingan dari berbagai kalangan akademisi maupun praktisi. Disamping itu, juga karena sumbernya, yaitu disiplin antropologi hingga sekarang belum dapat menghasilkan satu definisi yang dapat diterima oleh para peminat atau para pakar dalam bidang ini. Berikut merupakan pendekatan, perspektif dan pandangan mengenai budaya organisasi, yaitu :

1. Pandangan Holistik

Pandangan ini mengikuti pikiran-pikiran yang dicetuskan oleh *Benedict, Kroeber* dan *Kluckhohn*, yang memadukan seluruh aspek kognitif, emosi, perilaku dan benda-benda kedalam satu kesatuan budaya sebagai suatu totalitas atau keseluruhan, baik mencakup perilaku, pikiran atau nilai-nilai dan yang membedakan suatu organisasi terhadap organisasi lainnya.

Pandangan yang dianggap mewakili kelompok holistik mengatakan budaya perusahaan dapat dideskripsikan sebagai suatu konstelasi umum daripada keyakinan-keyakinan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, sistem-sistem nilai, norma-norma perilaku dan cara-cara melakukan bisnis yang unik bagi masing-masing perusahaan, yang menetapkan pola-pola perilaku dan emosi-emosi yang implisit dan yang muncul menandai kehidupan dalam organisasi.

2. Pandangan Variabel

Dalam kepustakaan manajemen pandangan variabel tersebut juga pandangan perilaku, lebih memfokuskan pada ekspresi budaya yang dapat disimak dalam bentuk verbal dan perilaku fisik atau peraktik, merupakan manifestasi kultur yang *tangible*. Definisi yang biasanya digunakan cukup ringkas seperti yang diberikan oleh Deal & Kennedy (1982), mengatakan bahwa budaya ialah “*the way we do things around here*”. Cukup pendek tetapi yang disebut *things* dan *way* itu banyak sekali. Jadi, meskipun definisinya pendek dan sederhana tetapi dapat berisi muatan yang banyak sekali.

3. Pandangan Kognitif

Pandangan kognitif seperti telah dikatakan dibagian depan merupakan ancangan yang digunakan dalam studi ini, memfokuskan pada ide-ide, konsep-konsep, rancangan-rancangan (*blue-prins*), keyakinan-keyakinan, nilai-nilai atau norma-norma yang dilihat sebagai inti (*core*) dari fenomena yang kompleks dan multifaset yang disebut budaya. Menurut pandangan ini, yang akan disebut pandangan budaya organisasi dapat digambarkan sebagai suatu konstruksi aturan-aturan sosial yang menuntun persepsi dan pikiran.

2.1.1.5 Manfaat Budaya Organisasi

Menurut Putri & Yusuf (2022) perkembangan berkelanjutan suatu perusahaan akan sangat tergantung dalam budaya perusahaan. Budaya suatu perusahaan bisa dimanfaatkan menjadi andalan daya saing suatu perusahaan dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Budaya organisasi bisa dijadikan menjadi rantai pengikat buat menyamakan persepsi atau arah pandangan anggota organisasi terhadap suatu pertarungan sebagai akibatnya akan sebagai satu kekuatan buat mencapai suatu tujuan. Berikut beberapa manfaat budaya organisasi, yaitu :

1. peran yang membedakan satu organisasi dari yang lain. setiap organisasi memainkan peran yang unik, sehingga akar budaya yang mendalam dalam proses dan aktivitas yang ada didalam perusahaan sangat penting.

2. Memberi anggota organisasi rasa memiliki. Anggota organisasi akan memiliki identitas yang menjadi ciri khas organisasi jika memiliki budaya organisasi yang kuat.
3. Mengutamakan tujuan masyarakat daripada kepentingan individu.
4. Jaga semuanya agar tetap teratur. Keadaan organisasi akan cukup stabil karena kesatuan komponen atau organisasi yang disatukan oleh pemahaman budaya yang sama.

2.1.1.6 Elemen Budaya Organisasi

Menurut Putri & Yusuf (2022) budaya organisasi merupakan sistem makna yang dianut oleh anggota-anggota sekaligus membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Budaya organisasi juga menjadi aturan main yang terdapat pada perusahaan yang digunakan sebagai pegangan bagi manusianya ketika menjalankan kewajiban dan nilai-nilai yang berperilaku pada organisasi tersebut. Masih dalam budaya organisasi terdapat tujuh elemen budaya perusahaan adalah :

1. Inovasi dan pengambilan risiko, Sejauh mana karyawan berhasil menjadi kreatif dan mengambil peluang.
2. Perhatikan poin-poin yang lebih luas, karyawan diharapkan untuk menghargai kejelasan, analisis dan perhatian terhadap detail sampai batas tertentu.

3. Hasil orientasi, jumlah dimana manajemen lebih fokus pada strategi dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut daripada hasil itu sendiri.
4. Fokus pada orang, sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan konsekuensi dari hasil ini bagi karyawan.
5. Pengenalan tim, sejauh mana pekerjaan diorganisasikan dalam kelompok daripada oleh individu.
6. Agresivitas adalah nomor enam dalam daftar, ketika datang kewaktu luang betapa agresif dan kompetitifnya orang.
7. Stabilitas, sejauh upaya organisasi tumbuh mempertahankan status *quo* (mempertahankan kondisi mapan seperti sebelumnya).

2.1.1.7 Model Budaya Organisasi

Menurut Edgar Schein dalam Alhempy et al. (2024:30), dalam analisisnya yang mendalam tentang budaya organisasi, memperkenalkan model tiga tingkat budaya organisasi yang mencakup artefak, nilai-nilai yang dianut dan asumsi dasar. Model ini bukan hanya menggambarkan struktur budaya, tetapi juga menunjukkan bagaimana setiap tingkat saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.

1. Artefak : Artefak adalah aspek budaya yang paling mudah diamati dan diidentifikasi. Ini mencakup elemen-elemen seperti tata letak kantor, symbol perusahaan, pakaian kerja dan ritual organisasi. Meskipun artefak

mudah diamati, mereka seringkali memerlukan interpretasi untuk memahami makna dibalikinya. Misalnya, tata letak kantor yang terbuka mungkin mencerminkan nilai keterbukaan dan kolaborasi dalam organisasi.

2. Nilai-nilai yang dianut : Nilai-nilai ini adalah prinsip-prinsip yang dipegang oleh anggota organisasi yang memandu perilaku mereka. Nilai-nilai tersebut bisa bersifat eksplisit, seperti yang tertulis dalam pernyataan misi perusahaan atau implisit yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari. Nilai-nilai ini memberikan panduan tentang apa yang dianggap penting dan diutamakan dalam organisasi.
3. Asumsi dasar : Asumsi dasar adalah keyakinan mendasar yang tidak disadari oleh anggota organisasinya tetapi sangat memengaruhi cara mereka berfikir, merasakan dan bertindak. Asumsi-asumsi ini seringkali diambil sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Misalnya, asumsi tentang apakah manusia pada dasarnya dapat dipercaya atau harus diawasi ketat akan sangat mempengaruhi struktur control dalam organisasi. *Schein* menekankan bahwa untuk benar-benar memahami budaya organisasi, perlu untuk menggali hingga ke tingkat asumsi dasar. Ini karena asumsi dasar ini yang paling sulit diubah dan paling memengaruhi perilaku dan praktik organisasi.

2.1.1.8 Pengukuran Budaya Organisasi

Dalam hal ini pengukuran budaya organisasi dilakukan dengan menggunakan kriteria pengungkapan budaya organisasi dengan memberikan skor 0 sampai 5 di tiap elemennya :

Tabel 2.1
Kriteria Pengukuran Budaya Organisasi (*Culture Moderasi OCAI*)

No	Kriteria	Uraian
1.	C1	Perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai guna mencapai target
2.	C2	Perusahaan berkomitmen mempererat hubungan dan membangun kerjasama antar karyawan
3.	C3	Perusahaan senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi
4.	C4	Perusahaan memotivasi karyawan untuk menjadi inovatif, kreatif dan kewirausahaan
5.	C5	Perusahaan membina hubungan yang baik dengan organisasi eksternal untuk lebih berkembang
6.	C6	Perusahaan menjadi pilar yang mendorong dalam pembangunan berkelanjutan
7.	C7	Perusahaan membuat tim saling bergantung dan bekerja
8.	C8	Efektivitas perusahaan dilihat dari profitabilitas dan pangsa pasar
9.	C9	Perusahaan berorientasi pada daya saing dan produktivitas
10.	C10	Perusahaan memiliki kompetitif yang tinggi
11.	C11	Perusahaan memiliki karyawan yang kuat dan saling bersinergi
12.	C12	Pelanggan adalah mitra dari perusahaan
13.	C13	Perusahaan adalah organisasi yang stabil dan konsisten
14.	C14	Perusahaan antisipasi sudah melakukan perubahan yang begitu cepat
15.	C15	Perusahaan sudah menerapkan peraturan dan prosedur yang sama bagi semua karyawan

Sumber : Cameron & Quinn (2011)

Sebanyak 15 indikator ini yang akan digunakan oleh peneliti sebagai indikator untuk menilai pengungkapan budaya organisasi dengan menggunakan

konten analisis terhadap budaya organisasi yang diterbitkan oleh perusahaan selama tahun 2021-2023. Dalam penelitian ini *test scoring* yang digunakan adalah metode kuantitatif.

Tabel 2. 2
Indeks Skor Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Skor	Kuantitatif	Skor	Kualitatif
0	Tidak informasi yang diungkapkan sesuai dengan indikator	1	Hanya kualitatif
1	Kalimat	2	Kualitatif dan moneter
2	Paragraf	3	Kualitatif dan non-moneter
3	2-3 Paragraf	4	Kualitatif dan diagram (tabel/bagan)
4	4-5 Paragraf	5	Kualitatif, moneter dan non-moneter
5	>5 Paragraf	6	Kualitatif, moneter dan diagram (tabel/grafik)
		7	Kualitatif, non-moneter dan diagram (tabel/grafik)
		8	Kualitatif, moneter, non-moneter dan diagram (tabel/grafik)

Sumber : Raar (2002) dalam Crowther & Lauesen (2017)

konten analisis dengan memberikan nilai 0 sampai 5 sesuai theory Raar (2002) yang digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh mana suatu kategori muncul dalam konten tertentu :

$$BO = \frac{\text{Nilai total item yang diungkapkan di tiap elemen}}{\text{Jumlah nilai keseluruhan item pada tiap elemen}} \times 100\%$$

Keterangan :

BO = Budaya Organisasi

2.1.2 *Green Financing*

2.1.2.1 Pengertian *Green Financing*

Menurut Bapang (2023) yang menjelaskan mengenai *green financing* sebagai berikut :

“Green financing atau pembiayaan hijau adalah suatu kebijakan untuk meningkatkan tingkat aliran keuangan (perbankan, kredit mikro, asuransi dan investasi) dari sektor publik, swasta dan nirlaba ke prioritas pembangunan berkelanjutan”.

Menurut Zheng et al (2021) yang mendefinisikan *green financing* adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan hijau adalah proses pembuatan ketentuan keuangan untuk kegiatan pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan sekaligus meningkatkan kinerja ekonomi”.

Menurut Yu et al. (2023) yang memaparkan *green financing* adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan hijau sebagai layanan keuangan yang diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti perlindungan lingkungan, respons terhadap perubahan iklim dan konservasi sumber daya serta efisiensi energi”.

Menurut Pratama & Firmansyah (2024) yang mengartikan *green financing* adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan hijau (*green financing*) merupakan kegiatan yang menggunakan berbagai instrument keuangan dalam melakukan pembiayaan suatu proyek/kegiatan yang ramah lingkungan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan”.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan hijau adalah pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang memperhatikan pengelolaan dan

efisiensi lingkungan agar dapat dinikmati dimasa kini dan masa depan untuk mendukung keberlanjutan.

2.1.2.2 Tujuan Green Financing

Secara umum, pemerintah mengejar tujuan melalui langkah-langkah pembiayaan hijau sebagai berikut Suparman, (2023:125) :

1. Membangun dan mengamankan pendanaan untuk industri hijau dan pertumbuhan hijau.
2. Mendukung pertumbuhan hijau rendah karbon dengan mengembangkan produk keuangan baru.
3. Menarik investasi swasta untuk membangun dan mempertahankan infrastruktur hijau.
4. Memperkuat pengungkapan praktik manajemen hijau oleh perusahaan dan memperluas dukungan keuangan untuk bisnis yang menerapkannya.
5. Mengatur pasar untuk barang dan jasa lingkungan, seperti pasar karbon yang menampilkan kredit karbon.

2.1.2.3 Manfaat Green Financing

Pembiayaan hijau memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut Suparman, (2023:123) :

Industri Keuangan :

1. Pengembangan produk-produk keuangan hijau
2. Penambahan finansial untuk industri dan teknologi
3. Peningkatan teknik-teknik manajemen risiko
4. Efisiensi operasionalisasi pasar perdagangan emisi

Pertumbuhan ekonomi :

1. Pengembangan teknologi-teknologi baru
2. Promosi industri ramah secara ekologis
3. Mendesain skema perdagangan yang efisiensi

Peningkatan Lingkungan :

1. Lingkungan lebih baik melalui industri dan teknologi hijau
2. Mengaktifkan perdagangan melalui pasar karbon (trading carbon)
3. Legislasi untuk lingkungan yang lebih baik

2.1.2.4 Prinsip-Prinsip *Green Financing*

Prinsip-prinsip pembiayaan hijau menurut Yu et al, (2023) dalam Purwanto et al., (2024:69) mencakup beberapa hal seperti :

1. Pembiayaan hijau harus mendukung pengembangan proyek-proyek yang berkelanjutan di berbagai sektor, seperti perlindungan lingkungan, konservasi energi, transportasi hijau dan bangunan hijau.
2. Pembiayaan hijau juga harus memobilisasi modal sosial lebih banyak untuk berinvestasi dalam industri-industri hijau.

3. Pembiayaan hijau harus mempromosikan pertumbuhan industri hijau dan mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk target-target netralisasi karbon.

2.1.2.5 Kriteria Green Financing

Kriteria pembiayaan hijau menurut Fang, (2023) dalam Purwanto et al., (2024:69–70) biasanya meliputi :

1. Proyek yang dibiayai harus dipilih berdasarkan potensi mereka untuk memberikan manfaat lingkungan yang nyata.
2. Harus ada sistem evaluasi dan monitoring yang kuat untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai memenuhi tujuan lingkungan yang ditetapkan.
3. Proyek harus mematuhi standar lingkungan yang relevan dan seringkali harus mengikuti pedoman atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan atau standar internasional.
4. Pembiayaan hijau harus memastikan bahwa proyek yang dibiayai dapat beroperasi secara ekonomis berkelanjutan dalam jangka panjang sehingga tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga berkelanjutan *financial*.
5. Pembiayaan hijau seringkali mendorong inovasi dalam teknologi dan praktek yang dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

6. Proses pembiayaan hijau harus melibatkan pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal, organisasi lingkungan dan pihak berkepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai mendapat dukungan luas dan memenuhi kebutuhan sosial serta lingkungan.
7. Harus ada mekanisme yang jelas untuk mengukur dan melaporkan manfaat lingkungan yang dihasilkan oleh proyek yang dibiayai termasuk pengurangan emisi, peningkatan kualitas udara dan penghematan energi.
8. Proyek yang dibiayai harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang mencakup berbagai target lingkungan, sosial dan ekonomi.

2.1.2.6 Inovasi dalam keuangan hijau

Inovasi dalam keuangan hijau memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Keuangan hijau mengacu pada aliran dana yang didedikasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Lubis et al., (2024:154–156).

1. Obligasi Hijau (*Green Bonds*)

Obligasi hijau adalah *instrument* keuangan yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi hijau digunakan untuk proyek seperti

energi terbarukan, pengelolaan air, efisiensi energi dan pengelolaan limbah. Obligasi hijau membantu mengatasi kendala pembiayaan dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk inovasi hijau. Studi menunjukkan bahwa obligasi hijau mengurangi risiko finansial dan meningkatkan investasi dalam proyek hijau, membantu mencapai target emisi karbon yang lebih rendah dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

2. Pinjaman Hijau (*Green Loans*)

Pinjaman hijau adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Pinjaman ini biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah dan persyaratannya yang lebih fleksibel dibandingkan pinjaman konvensional. Pinjaman hijau digunakan untuk mendanai proyek-proyek seperti Pembangunan gedung hijau, inisiatif efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan lainnya. Inovasi ini membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka.

3. Teknologi Canggih

Integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *Blockchain* dan *Internet of things* (IoT) dalam keuangan hijau telah membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. AI digunakan untuk menganalisis data lingkungan secara real-time, memberikan wawasan yang dapat di tindaklanjuti untuk mengurangi dampak lingkungan. *Blockchain* memungkinkan pelacakan yang

transparan dan akurat atas aliran dana hijau, memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, IoT memungkinkan pemantauan lingkungan yang lebih efektif, menyediakan dana yang akurat untuk mendukung keputusan investasi hijau.

4. Dana Hijau (*Green Funds*)

Dana hijau adalah kumpulan modal yang di investasikan dalam proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dana ini membantu mengurangi biaya investasi hijau dengan mengumpulkan modal dari berbagai investor. Dengan skala ekonomi dan layanan yang lebih khusus, dana hijau dapat menyediakan modal yang diperlukan untuk proyek-proyek berkelanjutan dengan biaya yang lebih rendah. Ini mencakup berbagai proyek seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan dan teknologi bersih.

5. Pasar Karbon (*Carbon Markets*)

Pasar karbon adalah mekanisme keuangan yang memungkinkan perdagangan kredit karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perusahaan yang melebihi batas emisi mereka dapat membeli kredit karbon dari perusahaan yang berada di bawah batas tersebut. Inovasi ini membantu mengurangi biaya pengurangan emisi dan mendorong investasi dalam teknologi rendah karbon. Pasar karbon juga menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk mengurangi jejak karbon mereka dan mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon.

6. Pengungkapan dan Transparansi

Pengungkapan yang transparan dan akuntabel tentang kinerja lingkungan adalah elemen penting dalam keuangan hijau. Standar pelaporan seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan ISO 14001 membantu perusahaan melaporkan dampak lingkungan mereka secara akurat. Transparansi ini membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan investor, mendorong investasi hijau dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan mereka.

7. Jaringan Investor Hijau

Jaringan investor hijau adalah *platform* yang menghubungkan investor dengan peluang investasi hijau. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan tentang proyek-proyek hijau, membantu investor membuat Keputusan yang lebih baik. Jaringan ini juga meningkatkan preferensi perusahaan untuk proyek hijau melalui tekanan dari investor institusi dan program Pendidikan online. Hal ini mendorong lebih banyak investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan dan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Inovasi dalam keuangan hijau merupakan kunci untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengintegrasikan teknologi canggih, meningkatkan partisipasi sektor swasta, mengembangkan regulasi yang mendukung dan mendorong transparansi. Dunia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

2.1.2.7 Indikator *Green Financing*

Menurut Nath et al (2014) dalam Nugraha et al., (2024:142–143), terdapat enam indikator dalam menentukan perbankan hijau berdasarkan *Green Coin Rating (GCR)*, yaitu :

1. *Carbon Emissions*

Kebijakan bank meniadakan aktivitas internal perbankan dan nasabah yang dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca.

2. *Green Rewards*

Kebijakan perbankan memberikan *reward* kepada *stakeholder* yang berkontribusi besar pada pelaksanaan bisnis yang ramah lingkungan.

3. *Green Building*

Kantor bank yang sehat dan nyaman serta hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan.

4. *Reuse/Recycle/Refurbish*

Kebijakan aktivitas internal perbankan menggunakan dan mengelola kembali sampah menjadi barang baru yang bermanfaat serta mendukung bisnis nasabah yang menerapkan prinsip 3R.

5. *Paper Work or Paperless*

Kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi bisnis perbankan. Salah satu solusi dengan penggunaan teknologi dalam operasional perbankan.

6. *Green Investment*

Kebijakan pemberian modal atau pembiayaan (kredit) perbankan di fokuskan pada nasabah yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan, proyek air dan udara bersih serta investasi yang ramah lingkungan.

2.1.2.8 Pengukuran *Green Financing*

Berikut ini adalah kriteria yang akan digunakan dalam melakukan penilaian atau pengungkapan *green financing* dalam memperoleh nilai atau skor, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Kriteria Pengungkapan *Green Financing*

No	Kriteria	Uraian
1.	GRF1	Organisasi kami menyediakan kegiatan dan proyek hijau
2.	GRF2	Perusahaan kami memiliki kebijakan mengalokasikan dana untuk kegiatan berkelanjutan
3.	GRF3	Entitas kami meminjam uang dari institusi untuk mendukung proyek hijau
4.	GRF4	Perusahaan kami telah berinvestasi dalam <i>instrument</i> keuangan hijau seperti obligasi hijau

Sumber : Appiah-Kubi et al. (2024)

Menurut Appiah-Kubi et al (2024) perhitungan *Green Financing Disclosure Index* (GFDI) dilaksanakan dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan dan 0 jika suatu item tidak diungkapkan dengan menggunakan konten analisis. Selanjutnya, setelah pemberian skor untuk seluruh perusahaan,

skor tersebut kemudian dijumlahkan agar mendapatkan total skor yang diperoleh setiap perusahaannya. Berikut merupakan rumus perhitungan yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

$$GFDI = \frac{\text{Jumlah Item yang Diungkapkan}}{\text{Jumlah Item yang Seharusnya Diungkapkan}}$$

2.1.3 *Good Corporate Governance*

2.1.3.1 *Definisi Good Corporate Governance*

Menurut Nasiroh & Priyadi (2018) *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“GCG (*Good Corporate Governance*) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya”.

Hamdani, (2016:279) memaparkan bahwa *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* (GCG) menurut peraturan Menteri negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

Mendefinisikan Cahyani et al. (2024) *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* (GCG) atau yang kita kenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik yaitu departemen-departemen perusahaan bekerja sama untuk memastikan keberhasilan perusahaan, meningkatkan standar berdasarkan kode etik dan memastikan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya”.

Putri & Muid (2017) yang mengartikan *good corporate governace* adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* adalah suatu bentuk pengelolaan perusahaan yang baik dimana didalamnya terdapat suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana luar”.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Badawi & Hartati, (2024:24–25) *good corporate governance system* atau pengelolaan perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih baik bagi *stakeholdernya* yang sesuai dengan prinsip GCG yaitu :

1. *Responsibility* (Responsibilitas)

Prinsip responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. *Independency* (Independen)

Independen merupakan suatu keadaan atau posisi Dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Independen menunjukkan sikap bebas yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu atau kelompok/organisasi tertentu.

3. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

4. *Accountability* (Akuntabilitas)

Segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengelola dan pemanfaatan sumber daya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian dan evaluasi. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan Keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceability yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.

5. *Transparency* (Transparansi)

Secara sederhana transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan. Transparansi akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut perusahaan. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan

Keputusan di lingkungan korporasi, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

2.1.3.3 Fungsi-Fungsi *Good Corporate Governance*

Dari prinsip-prinsip tersebut menurut Badawi & Hartati, (2024:10) terdapat fungsi-fungsi dan pihak-pihak yang terkait dalam penerapan GCG adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *oversight* (perhatian secara keseluruhan) oleh *board of directors* (dewan direksi)
2. Fungsi *enforcement* (penegakan) oleh *CEO*
3. Fungsi *advisory* (penasihat/pemberi saran) oleh dewan komisaris
4. Fungsi monitoring (pemantauan) oleh *stakeholder*

Corporate governance berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas daya yang mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

2.1.3.4 Model Good Corporate Governance

Menurut H.R. Daeng Naja, (2008) dalam Badawi & Hartati, (2024:10–11) model GCG dapat dikemukakan sebagai berikut ;

1. *Principal agent* model atau dikenal dengan *agency theory* yaitu korporasi dikelola untuk memberikan *win win solution* bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak dan manajer sebagai agen di pihak lain.
2. *The myopic market model* masih memfokuskan perhatian pada kepentingan-kepentingan pemegang saham dan manajer yaitu *sentiment* pasar lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor lain diluar *corporate governance*.
3. *Stakeholder* model yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas.

2.1.3.5 Manfaat Good Corporate Governance

Menurut Badawi & Hartati, (2024:11) manfaat *Good Corporate Governance* adalah untuk dapat menerapkan *system* GCG pada perusahaannya, maka pihak-pihak yang terkait dalam internal perusahaan harus ditanamkannilai-nilai yang mendorong untuk mau menerima, mendukung dan menerapkan GCG. Menurut Muh. Effendi (2009) dalam terdapat 4 (empat) manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dalam HCM, yaitu :

1. Suasana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan dan antara karyawan dengan manajemen.
2. Kinerja perusahaan meningkat karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan.
3. Perusahaan bisa terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan berbagai pihak karena segala kebijakan ditetapkan secara transparan dan akuntabel serta memenuhi prinsip keadilan (*fairness*).
4. Daya saing (*comvetitiveness*) perusahaan akan meningkat karena dapat mempertahankan karyawan yang kapabel, kompeten dan professional.

2.1.3.6 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Badawi & Hartati, (2024:15) tujuan *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat Keputusan dan menjalankan

tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada dan pada gilirannya memberikan value creation semua pihak yang terkait dengan perusahaan. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* telah mengembangkan “*The OECD Principles of Corporate Governance*” pada bulan April 1998. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik *system* hukum, budaya dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian prinsip yang universal tersebut akan menjadi pedoman untuk semua negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan *system* hukum, aturan atau nilai yang berlaku di negara masing-masing.

2.1.3.7 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Dalam penelitian ini pengungkapan *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan yang ditetapkan BAPEPAM dan Lembaga keuangan Nomor kep-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6. Terdapat 18point yang memuat 96 item pengungkapan yang digunakan. Semakin tinggi kesesuaian antara GCG dengan peraturan BAPEPAM, maka semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan perusahaan tersebut. Berikut adalah penjelasannya mengenai klasifikasi dengan item-itemnya :

Tabel 2. 4

Indeks Good Corporate Governance

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1.	Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> a. Uraian mengenai hak pemegang saham b. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham c. Tanggal pelaksanaan RUPS d. Hasil RUPS
2.	Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama-nama anggota Dewan Komisari b. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen) c. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris d. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris e. Mekanisme dan kriteria kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris f. Jumlah rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi g. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
3.	Direksi	<p>h. Mekanisme pengambilan keputusan</p> <p>a. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing</p> <p>b. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>c. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi</p> <p>d. Mekanisme pengambilan wewenang</p> <p>e. Mekanisme pengdelegasian wewenang</p> <p>f. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan</p> <p>g. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaria</p>
4.	Komite Audit	<p>a. Nama</p> <p>b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja dan dasar hukum penunjukan</p> <p>c. Riwayat Pendidikan</p> <p>d. Periode jabatan anggota Komite Audit</p> <p>e. Pengungkapan independensi Komite Audit</p> <p>f. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit</p> <p>g. Tingkat kehadiran komite audit dalam rapat</p> <p>h. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) Komite Audit</p>
5.	Komite Nominasi dan Remunerasi	<p>a. Nama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <p>b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki dan dasar hukum pertunjukan</p> <p>c. Periode jabatan anggota komite</p> <p>d. Riwayat Pendidikan</p> <p>e. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <p>f. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi</p>

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi h. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite Nominasi dan Remunerasi i. Independensi anggota komite Nominasi dan Remunerasi
6.	Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko b. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko c. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko d. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko e. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat f. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko g. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko
7.	Komite-Komite Lain Yang Dimiliki Oleh Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama anggota komite b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki dan dasar hukum penunjukan c. Riwayat Pendidikan d. Periode jabatan anggota komite e. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite f. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat g. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite h. Independensi anggota Komite
8.	Sekretaris Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama Sekretaris Perusahaan b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki dan dasar hukum penunjukan c. Riwayat Pendidikan d. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan e. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan
9.	Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama anggota Audit Internal b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki dan dasar hukum

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
		penunjukan c. Struktur dan kedudukan unit Audit Internal d. Tugas dan tanggung jawab unit Audit Internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) unit Audit Internal e. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit Audit Internal pada tahun buku
10.	Sistem Pengendalian Intern	a. Pengendalian keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. b. <i>Review</i> atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern
11.	Manajemen Risiko Perusahaan	a. Gambaran umum mengenai sistem Manajemen risiko perusahaan b. Jenis risiko dan cara pengelolaan risiko c. <i>Review</i> atas efektivitas Sistem Manajemen risiko perusahaan
12.	Perkara Penting Yang Dihadapi Oleh Perusahaan, Entitas Abaka, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	a. Pokok perkara/gugatan b. Status penyelesaian perkara/gugatan c. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan
13.	Pernyataan Sanksi Administrasi	a. Informasi tentang sanksi administrasi yang dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, dan direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku berakhir
14.	Akses Informasi dan Data Perusahaan	a. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan b. Daftar penyebaran informasi ke publik
15.	Kode Etik dan Budaya Perusahaan	a. Pokok-pokok kode etik b. Pokok-pokok budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) c. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya d. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi dewan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
16.	Sistem Pelaporan Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Cara penyampaian pelanggaran b. Perlindungan bagi pelapor c. Penanganan pengaduan d. Pihak yang mengelola pengaduan e. Hasil dari penanganan pengaduan
17.	Pernyataan Penerapan GCG	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan prinsip-prinsip GCG b. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan c. Kepatuhan terhadap pedoman GCG d. Keberadaan Board Manual e. Struktur tata Kelola perusahaan f. Hasil penerapan GCG selama setahun g. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor
18.	Informasi Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Visi perusahaan b. Misi perusahaan c. Nilai-nilai perusahaan d. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya e. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga <i>exercise</i> f. Uraian Mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. g. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan h. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Sumber : www.ojk.go.id

Jika struktur *Good Corporate Governance* diungkapkan dengan *Disclosure Index*, jika diungkapkan maka diberikan point 1 dan jika tidak

diungkapkan maka diberikan point 0. Menurut (Damor Professor & Jakhariya, 2020) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$CGDI = \frac{\textit{Aktual Score}}{\textit{Expected Score}} 100$$

2.1.4 Sustainability Report

2.1.4.1 Pengertian Sustainability Report

Laporan keberlanjutan memungkinkan organisasi untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai masalah keberlanjutan. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih transparan tentang resiko dan peluang yang mereka hadapi. Laporan keberlanjutan adalah tempat untuk mengomunikasikan kinerja dan dampak keberlanjutan. Laporan keberlanjutan dalam bentuk dasarnya adalah laporan tentang kinerja sosial organisasi dan lingkungan.

Untuk membuat laporan ini menjadi lebih berguna mungkin bagi pemangku kepentingan, pemegang saham, analisis, eksekutif dan manajer. Standar terpadu yang memungkinkan laporan untuk dinilai dengan cepat, dinilai cukup dan hanya dibandingkan adalah bagian penting. Karena perusahaan dunia telah Menyusun pelaporan keberlanjutan *Global Reporting Initiative* (GRI) (Sukaharsono & Andayani, 2021:67).

Menurut *Global Reporting initiative* (2013) dalam Dewi et al., (2024:42) mendefinisikan *sustainability report* sebagai berikut :

“*Sustainability Report* adalah laporan yang menyampaikan pengungkapan tentang dampak organisasi baik positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi”.

Menurut Wijaya & Santi, (2021:14) menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan atau *sustainability report* adalah sebagai berikut :

“Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) merupakan laporan hasil kinerja suatu LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan yang di dalamnya termuat informasi keuangan, ekonomi, sosial dan lingkungan dan dipublikasikan kepada masyarakat”.

Menurut Sukaharsono & Andayani, (2021:41) menjelaskan mengenai *sustainability report* secara rinci :

“Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (*disclosure*) serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan, Dimana di dalam pelaporan ini terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial”.

Menurut Dewi dan Sudana (2015) dalam Dewi et al., (2024:42) memaparkan mengenai *sustainability report* adalah sebagai berikut :

“*Sustainability Report* merupakan laporan keuangan dan non-keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui informasi-informasi yang terdapat di dalam ruang lingkup perusahaan dan kegiatan ekonomi dan sosial”

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *Sustainability Report*

Tujuan dan manfaat *sustainability report* menurut Herzig dan Schaltegger (2006) dalam Dewi et al., (2024:43) adalah :

1. Melegitimasi aktivitas, produk dan layanan perusahaan yang memberikan dampak sosial dan lingkungan.
2. Meningkatkan reputasi perusahaan dan *brand value*.
3. Memperoleh suatu keunggulan kompetitif.
4. Menjadi sinyal suatu daya saing yang unggul dari perusahaan.
5. Perbandingan dan *benchmarking* bagi pesaing.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
7. Mendukung dan memberikan motivasi karyawan seperti informasi internal dan proses pengendalian.

2.1.4.3 Pentingnya Melaporkan *Sustainability Report*

Alasan utama perusahaan melaporkan *sustainability report* menurut Bini dan Bellucci (2020) dalam Dewi et al., (2024:44) adalah :

1. Memiliki kemampuan untuk menelusuri kemajuan terhadap target tertentu.
2. Mempasilitasi implementasi strategi tentang lingkungan.
3. Meningkatkan *awareness* terkait dengan isu lingkungan dalam perusahaan.

4. Meningkatkan kemampuan penyampaian pesan perusahaan baik kepada pihak internal maupun eksternal.
5. Meningkatkan kredibilitas melalui transparansi.
6. Meningkatkan komunikasi terkait dengan *effort* dan standar.
7. Memiliki lisensi untuk beroperasi dan kampanye.
8. Bermanfaat bagi reputasi perusahaan.
9. Mengidentifikasi penghematan biaya,
10. Meningkatkan efisiensi.
11. Mendorong bisnis.
12. Mengembangkan peluang dan meningkatkan moral karyawan.

2.1.4.4 Prinsip-Prinsip *Sustainability Report*

Menurut Saraswati & Alam, (2022:50–52) dalam membuat laporan keberlanjutan berdasarkan GRI (2016) ada beberapa prinsip yang harus digunakan karena akan menentukan kualitas laporan keberlanjutan yang di dalamnya terdapat *content* dan *quality* yang akan dibahas secara rinci :

1. Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Inclusiveness*)

Prinsip ini mengharuskan organisasi yang melaporkan laporannya untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dan menjelaskan bagaimana para pemangku kepentingan yang terlibat dan menjelaskan bagaimana para pemangku kepentingan itu merespon dan

ekspektasi para pemangku kepentingan. Hal ini menjelaskan bahwa organisasi dalam laporannya harus melibatkan para pemangku kepentingan.

2. Konteks Keberlanjutan (*Sustainability Context*)

Laporan keberlanjutan suatu organisasi harus melaporkan konteks keberlanjutan secara lebih luas. Organisasi harus berkomitmen untuk menerapkan keberlanjutan dalam strategi dan praktek-praktek organisasinya.

3. Prinsip Materialitas (*Materiality Principle*)

Laporan Keberlanjutan suatu organisasi harus mencakup :

- a. Mencerminkan laporan yang secara signifikan berdampak terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial.
- b. Secara *substantif* berpengaruh pada penilaian dan keputusan dari pemangku kepentingan.

4. Prinsip Kelengkapan (*Completeness Principle*)

Prinsip ini mengharuskan laporan yang dibuat suatu organisasi harus mencakup *material topic* dan *boundaries*, yang dapat mengungkapkan dengan jelas dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, serta berguna bagi para menangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja laporan organisasi.

5. Prinsip Ketepatan (*Accuracy Principle*)

Informasi yang dilaporkan cukup akurat dan detail yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja laporan

berorganisasi. Laporan yang dibuat setidaknya harus dapat dilakukan pemeriksaan (audit). Sebagai contoh, pada informasi yang bersifat kualitatif dapat dipengaruhi oleh tingkat keterperincian, kejelasan hingga keseimbangannya yang relevan dengan batasan topik.

6. Prinsip Keseimbangan (*Balance Principle*)

Laporan suatu organisasi harus menyajikan informasi yang mudah dipahami dan diterima oleh para pemangku kepentingan. Informasi yang tersedia tidak membingungkan para pemakainya dan para pemangku kepentingan dapat menemukan informasi yang mereka inginkan dengan usaha yang minim.

7. Prinsip Perbandingan (*Comparability Principle*)

Prinsip ini mengharuskan organisasi mengumpulkan, melaporkan dan memilih dengan cara yang sama dari waktu ke waktu (konsisten). Para pemangku kepentingan menggunakan informasi yang diungkapkan untuk melakukan analisis terhadap perubahan suatu kegiatan yang ada yang masih adanya kekurangan di dalamnya.

2.1.4.5 Langkah Perbaikan *Sustainability Report*

Menurut Saraswati & Alam, (2022:40–42) format dan isi laporan keberlanjutan yang saat ini ada kurang terstandarisasi dan memiliki kualitas serta keandalan yang beragam. Terdapat enam perbaikan utama yang diperlukan dalam pengungkapan keberlanjutan :

1. Standarisasi format

Menstandarkan semua aspek kinerja keberlanjutan pada kondisi dimana tidak ada pedoman yang diterima secara global adalah pekerjaan yang sangat menantang. Saat ini perusahaan menyediakan laporan yang khusus dan spesifik tentang dimensi kinerja keberlanjutan (tidak termasuk kinerja ekonomi) termasuk rasio, grafik dan bagan tanpa nilai numerik dan deskripsi naratif yang memadai. Relevansi nilai laporan keberlanjutan akan meningkatkan secara signifikan jika laporan yang dihasilkan lebih terstandarisasi dan disusun berdasarkan pedoman yang diterima secara global.

2. Keterbandingan (*comparability*)

Laporan keberlanjutan akan berguna dan relevan bagi pemangku kepentingan jika mencerminkan alat ukur kinerja yang seragam dan dapat dibandingkan. Alat ukur kinerja ini harus diidentifikasi dengan tepat, diukur dengan benar, diukur secara konsisten dan dilaporkan secara seragam dan sebanding.

3. Ketersediaan (*availability*) dan Transparansi (*transparency*)

Saat ini hanya sebagian kecil perusahaan publik yang memberikan pengungkapan keberlanjutan terkait kinerja mereka. Dalam kasus, pengungkapan keberlanjutan tidak konsisten, tidak sebanding dan tidak transparan. Kurangnya ketersediaan dan transparansi informasi keberlanjutan menempatkan banyak perusahaan global dalam kerugian kompetitif karena lebih banyak pelaku pasar mengevaluasi perusahaan

berdasarkan kinerja terintegrasi secara keseluruhan dan bukan hanya kinerja ekonomi.

4. Ketepatan waktu (*timeliness*)

Laporan kinerja keberlanjutan harus terintegrasi dan tepat waktu sehingga bermanfaat untuk pengambilan Keputusan oleh pemangku kepentingan. Saat ini, dimensi lain dari kinerja keberlanjutan biasanya dilaporkan secara sukarela dan tidak konsisten kecuali untuk syarat pelaporan wajib untuk kinerja ekonomi. Beberapa perusahaan hanya melaporkan tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka setiap dua tahun atau lebih. Laporan keberlanjutan harus komprehensif disusun dan terintegrasi dalam satu laporan dan diungkapkan secara teratur dan berkesinambungan secara tepat waktu.

5. Keandalan (*reliability*)

Kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu laporan keberlanjutan memperkuat keandalan laporan tersebut. Keandalan laporan keberlanjutan memainkan peran penting dalam menentukan kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan terhadap informasi pada laporan tersebut. Sementara pihak manajemen bertanggung jawab atas keandalan laporan keberlanjutan, pelaksanaan asuransi dari pihak eksternal yang *independent* akan berkontribusi besar dalam meningkatkan keandalan laporan tersebut.

6. Analisis (*analysis*)

Laporan keberlanjutan yang terintegrasi harus mampu untuk menganalisis hubungan antara semua dimensi kinerja keberlanjutan. Misalnya, perusahaan yang diatur dengan baik dan etis juga harus mencapai kinerja ekonomi dan keuangan yang lebih berkelanjutan.

2.1.4.6 Kategori Pengungkapan *Sustainability Report*

Laporan keberlanjutan menyajikan informasi yang didalamnya membahas mengenai dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi organisasi. Terdapat salah satu format dalam *sustainability report* yaitu standar GRI. Semakin tinggi kesesuaian antara *sustainability report* dengan standar GRI, maka semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Standar GRI mengenai *sustainability report* opsi inti terdiri dari 113 item yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan adalah sebagai berikut :

1. Standar GRI 102 terdiri dari 33 item pengungkapan
2. Standar GRI 103 terdiri dari 3 item pengungkapan
3. Standar GRI 200 terdiri dari 13 item pengungkapan
4. Standar GRI 300 terdiri dari 30 item pengungkapan
5. Standar GRI 400 terdiri dari 34 item pengungkapan

Tabel 2. 5
Indeks Pengungkapan *Sustainability Report* Berdasarkan GRI Standard

No	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
1. GRI 102		
Profil Organisasi		
1.	GRI 102-1 (G4-3)	Nama organisasi
2.	GRI 102-2 (G4-4)	Kegiatan, Merek, Produk dan Jasa
3.	GRI 102-3 (G4-5)	Lokasi kantor pusat
4.	GRI 102-4 (G4-6)	Lokasi operasi
5.	GRI 102-5 (G4-7)	Kepemilikan dan bentuk hukum
6.	GRI 102-6 (G4-8)	Pasar yang dilayani
7.	GRI 102-7 (G4-9)	Skala organisasi
8.	GRI 102-8 (G4-10)	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain
9.	GRI 102-9 (G4-12)	Rantai pasokan
10.	GRI 102-10 (G4-13)	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
11.	GRI 102-11 (G4-14)	Pendekatan atau prinsip pencegahan
12.	GRI 102-12 (G4-15)	Inisiatif eksternal
13.	GRI 102-13 (G4-15)	Keanggotaan asosiasi
Strategi		
14.	GRI 102-14 (G4-1)	Pernyataan dari pembuat keputusan senior
Etika dan Integritas		
15.	GRI 102-6 (G4-56)	Nilai, Prinsip, Standar dan Norma Perilaku
Tata Kelola		
16.	GRI 102-18 (G4-34)	Struktur tata kelola
Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
17.	GRI 102-40 (G4-24)	Daftar kelompok pemangku kepentingan

18.	GRI 102-41 (G4-11)	Perjanjian perundingan kolektif
19.	GRI 102-42 (G4-25)	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
20.	GRI 102-43 (G4-26)	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan
21.	GRI 102-44 (G4-27)	Topik utama dan masalah yang dikemukakan
Praktik Pelaporan		
22.	GRI 102-45 (G4-17)	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
23.	GRI 102-46 (G4-18)	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik
24.	GRI 102-47 (G4-22)	Daftar topik material
25.	GRI 102-48 (G4-23)	Penyajian kembali informasi
26.	GRI 102-49 (G4-28)	Perubahan dalam pelaporan
27.	GRI 102-50 (G4-29)	Periode pelaporan
28.	GRI 102-51 (G4-19)	Tanggal laporan terbaru
29.	GRI 102-52 (G4-30)	Siklus pelaporan
30.	GRI 102-53 (G4-31)	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
31.	GRI 102-54 (G4-32)	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
32.	GRI 102-55 (G4-32)	Indeks isi GRI
33.	GRI 102-56 (G4-33)	Assurance dari pihak eksternal
2. GRI 103		
Pendekatan Manajemen		
1.	GRI 103-1 (G4-DMA-a)	Penjelasan topik material dan batasannya
2.	GRI 103-2 (G4-DMA-b)	Pendekatan manajemen dan komponennya
3.	GRI 103-3 (G4-DMA-c)	Evaluasi pendekatan manajemen
3. GRI 200		
Performa Ekonomi		
1.	GRI 201-1 (G4-EC1)	Nilai ekonomi langsung yang diatribusikan

2.	GRI 201-2 (G4-EC2)	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
3.	GRI 201-3 (G4-EC3)	Kewajiban program pension manfaat pasti dan program pension lainnya
4.	GRI 201-4 (G4-EC4)	Bantuan finansial yang diterima pemerintah
Keberadaan Pasar		
5.	GRI 202-1 (G4-EC5)	Rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
6.	GRI 202-2 (G4-EC6)	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7.	GRI 203-1 (G4-EC7)	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
8.	GRI 203-2 (G4-EC8)	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
Praktik Pengadaan		
9.	GRI 204-1 (G4-EC9)	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
Anti Korupsi		
10.	GRI 205-1 (G4-SO3)	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
11.	GRI 205-2 (G4-SO4)	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan prosedur anti-korupsi
12.	GRI 205-3 (G4-SO5)	Insiden korupsi yang terbukti dan Tindakan yang diambil
Perilaku Anti Persaingan		
13.	GRI 206-1 (G4-SO7)	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli
4. GRI 300		
Material		
1.	GRI 301-1 (G4-EN1)	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
2.	GRI 301-2 (G4-EN2)	Material input dari daur ulang yang digunakan
3.	GRI 301-3 (G4-EN28)	Produk reclaimed dan material lemasannya
Energi		
4.	GRI 302-1 (G4-EN3)	Konsumsi energi dalam organisasi
5.	GRI 302-2 (G4-EN4)	Konsumsi energi diluar organisasi
6.	GRI 302-3 (G4-EN5)	Intensitas energi

7.	GRI 302-4 (G4-EN6)	Pengurangan konsumsi energi
8	GRI 302-5 (G4-EN7)	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
Air		
9.	GRI 303-1 (G4-EN8)	Pengambilan air berdasarkan sumber
10.	GRI 303-2 (G4-EN9)	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
11.	GRI 303-3 (G4-EN10)	Daur ulang dan penggunaan kembali
Keanekaragaman Hayati		
12.	GRI 304-1 (G4-EN11)	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola atau berdekatan dengan Kawasan lindung dan Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan lindung
13.	GRI 304-2 (G4-EN12)	Dampak signifikan dari kegiatan, produk dan jasa pada keanekaragaman hayati
14.	GRI 304-3 (G4-EN13)	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
15.	GRI 304-4 (G4-EN14)	Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Emisi		
16.	GRI 305-1 (G4-EN15)	Emisi GRK (cakupan 1) langsung
17.	GRI 305-2 (G4-EN16)	Emisi GRK (cakupan 2) tidak langsung
18.	GRI 305-3 (G4-EN17)	Emisi GRK (cakupan 3) tidak langsung lainnya
19.	GRI 305-4 (G4-EN18)	Intensitas emisi GRK
20.	GRI 305-5 (G4-EN19)	Pengurangan emisi GRK
21.	GRI 305-6 (G4-EN20)	Emisi zat perusak ozon (ODS)
22.	GRI 305-7 (G4-EN21)	Nitrogen oksida, sulfur oksida dan emisi udara yang signifikan lainnya
Air Limbah dan Limbah		
23.	GRI 306-1 (G4-EN22)	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
24.	GRI 306-2 (G4-EN23)	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
25.	GRI 306-3 (G4-EN24)	Tumpahan yang signifikan

26.	GRI 306-4 (G4-EN25)	Pengangkutan limbah berbahaya
27.	GRI 306-5 (G4-EN26)	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air
Kepatuhan Lingkungan		
28.	GRI 307-1 (G4-EN29)	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
Penilaian Lingkungan Pemasok		
29.	GRI 308-1 (G4-EN32)	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
30.	GRI 308-2 (G4-EN33)	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah stabil
5. GRI 400		
Kepegawaian		
1.	GRI 401-1 (G4-LA1)	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
2.	GRI 401-2 (G4-LA2)	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau cuti paruh waktu
3.	GRI 401-3 (G4-LA3)	Cuti melahirkan
Hubungan Tenaga Kerja atau Manajemen		
4.	GRI 402-1 (G4-LA4)	Periode pemberitahuan terkait perubahan operasional
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
5.	GRI 403-1 (G4-LA5)	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen pekerja untuk Kesehatan dan keselamatan
6.	GRI 403-2 (G4-LA6)	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang dan ketidakhadiran serta jumlah kematian terkait pekerjaan
7.	GRI 403-3 (G4-LA7)	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
8.	GRI 403-4 (G4-LA8)	Topik Kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
Pelatihan dan Pendidikan		
9.	GRI 404-1 (G4-LA9)	Rata-rata pelatihan per tahun per karyawan
10.	GRI 404-2 (G4-LA10)	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
11.	GRI 404-3 (G4-LA11)	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
Keanekaragaman dan Kesempatan Kerja		

12.	GRI 405-1 (G4-LA12)	Keanekaragaman badan tata Kelola dan karyawan
13.	GRI 405-2 (G4-LA13)	Rasio gaji pokok dan remunerasi Perempuan dibandingkan dengan laki-laki
Non Diskriminasi		
14.	GRI 406-1 (G4-HR3)	Insiden diskriminasi dan Tindakan perbaikan dan dilakukan
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif		
15.	GRI 407-1 (G4-HR4)	Operasi dari pemasok dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
Pekerja Anak		
16.	GRI 408-1 (G4-HR5)	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
Kerja Paksa atau Wajib Kerja		
17.	GRI 409-1 (G4-HR6)	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
Praktik Keamanan		
18.	GRI 410-1 (G4-HR7)	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
Hak-Hak Masyarakat Adat		
19.	GRI 411-1 (G4-HR8)	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
Penilaian Hak Asasi Manusia		
20.	GRI 412-1 (G4-HR9)	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
21.	GRI 412-2 (G4-HR2)	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
22.	GRI 412-3 (G4-HR1)	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
Masyarakat Lokal		
23.	GRI 413-1 (G4-SO1)	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan
24.	GRI 413-2 (G4-SO2)	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
Penilaian Sosial Pemasok		
25.	GRI 414-1 (G4-LA14)	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
26.	GRI 414-2 (G4-LA15)	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Kebijakan Publik		
27.	GRI 415-1 (G4-SO6)	Kontribusi publik

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
28.	GRI 416-1 (G4-PR1)	Penilaian dampak Kesehatan dan keselamatan kerja dari berbagai kategori produk dan jasa
29.	GRI 416-2 (G4-PR2)	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak Kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
Pemasaran dan Pelabelan		
30.	GRI 417-1 (G4-PR3)	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
31.	GRI 417-2 (G4-PR4)	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa
32.	GRI 417-3 (G4-PR7)	Insiden ketidak patuhan terkait komunikasi pemasaran
Privasi Pelanggan		
33.	GRI 418-1 (G4-PR8)	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan Ekonomi		
34.	GRI 419-1 (G4-SO8)	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dibidang sosial dan ekonomi

Sumber : www.globalreporting.org

Sebanyak 113 indikator ini yang akan digunakan oleh peneliti sebagai indikator untuk menilai pengungkapan laporan keberlanjutan dengan menggunakan konten analisis terhadap laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan selama tahun 2021-2023. Dalam penelitian ini *test scoring* yang digunakan adalah metode kuantitatif.

Tabel 2. 6
Indeks Skor Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Skor	Kuantitatif	Skor	Kualitatif
0	Tidak informasi yang diungkapkan sesuai dengan indikator	1	Hanya kualitatif
1	Kalimat	2	Kualitatif dan moneter
2	Paragraf	3	Kualitatif dan non-moneter
3	2-3 Paragraf	4	Kualitatif dan diagram (tabel/bagan/grafik/gambar)
4	4-5 Paragraf	5	Kualitatif, moneter dan non-moneter
5	>5 Paragraf	6	Kualitatif, moneter dan diagram (tabel/bagan/grafik/gambar)
		7	Kualitatif, non-moneter dan diagram (tabel/bagan/grafik/gambar)
		8	Kualitatif, moneter, non-moneter dan diagram (tabel/bagan/grafik/gambar)

Sumber : Gunawan & Abadi (2017) dalam Susanto et al. (2022)

2.1.4.7 Pengukuran *Sustainability Report*

Menurut Febriyanti (2021) perhitungan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) dilakukan dengan memberikan skor 0 sampai 5 sesuai dengan kriteria indeks skor diatas. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap perusahaan.

Rumus untuk perhitungan SRDI adalah sebagai berikut :

$$SRDI = \frac{n}{k}$$

Dimana :

SRDI = *Sustainability Report Disclosure Index*

n = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

k = Jumlah item yang diharapkan

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai Budaya Organisasi, *Green Financing*, *Good Corporate Governance* dan *Sustainability Report* adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Multy Adra Madona Dan Muhammad Khafid (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Dengan	Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i> dan <i>sustainability</i>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi	keberlanjutan, sedangkan komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.	<i>report</i> . Perbedaan : Peneliti tidak melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017.
2.	<i>Pattanaporn Chatjuthamard, Pornsrit Jiraporn, Merve Kilic dan Ali Uyar (2023)</i>	<i>Corporate culture, corporate governance and independent directors : evidence from textual analysis</i>	Independensi dewan yang lebih kuat, diukur dengan proporsi direktur independen yang lebih tinggi, secara signifikan terkait dengan budaya perusahaan.	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>corporate governance</i> dan <i>corporate culture</i> . Perbedaan : Peneliti tidak melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
3.	Shinta Widyastuti, Masripah dan Dianwicakasih Arieftiara (2024)	<i>Comparative Study of corporate governance and culture in indonesia and Malaysia : the effect on tax avoidance and corporate sosial responsibility</i>	Praktik tata Kelola perusahaan dan budaya organisasi (diukur dengan keragaman dewan dan jarak kekuasaan) antara indonesia dan Malaysia. Ditemukan bahwa efektivitas	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>corporate governance</i> dan <i>culture in indonesia</i> Perbedaan ; Peneliti ini melakukan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			mekanisme tata Kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan pengungkapan CSR di indonesia, sedangkan di Malaysia efeknya negatif	penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia periode 2018-2022
4.	Andi Diana Putri dan Surifah Surifah (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris pada BUMN Periode 2016-2020)	<i>Debt to asset ratio</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , <i>Debt to Equity Ratio</i> dan dewan komisaris, serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i> dan <i>sustainability reporting</i> . Perbedaan : Peneliti ini melakukan studi empiris pada BUMN periode 2016-2020.
5.	Raden Rara Bunga Pertiwi (2023)	Pengaruh <i>Green Financing</i> pada Sektor Agrikultur dan <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Green financing</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BUS	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>green financing</i> dan <i>good corporate</i>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		(GCG) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2016-2022	dan UUS.	<i>governance</i> . Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada bank umum syariah dan unit usaha syariah tahun 2016-2022.
6.	Indra, Idhar Yahya dan Yeni Absah (2022)	<i>The Effect of Sustainability Reporting, Good Corporate Governance and Dividend Policy on Firm Value With Financial Performance as an Intervening Variable in Mining Company Listed on Indonesia Stock Exchange</i>	Variabel <i>sustainability reporting</i> dan <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan kebijakan <i>dividen</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat memediasi pengaruh <i>sustainability reporting</i> dan <i>good corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan. Kemudian kinerja keuangan tidak dapat memediasi pengaruh kebijakan <i>dividen</i>	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>sustainability reporting</i> dan <i>good corporate governance</i> . Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			terhadap nilai perusahaan.	
7.	Muhammad Candra Maulana (2023)	Pengaruh <i>Sustainability Reporting</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan : Studi pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2022	Secara parsial variabel <i>sustainability reporting</i> dan <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. sedangkan variabel kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>sustainability reporting</i> dan <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2022.</p>
8.	Nurul Imami (2024)	Analisis Pengaruh <i>Green Finance</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Perbankan Di Indonesia	<i>Green finance</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan <i>green finance</i> , <i>good corporate governance</i> dan kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan.	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>green finance</i> dan <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada perusahaan perbankan <i>sustainability report</i> tahun 2020-2022 yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan di website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).</p>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
9.	Ratna Ramadhani Damayanti, Anggita Langgeng Wijaya dan Ririh Anggraini Setyahety (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Green Intellectual Capital</i> dan Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Terhadap Kinerja Keuangan	GCG pada dimensi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. GCG pada dimensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. GCG pada dimensi kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengungkapan laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i> dan <i>Sustainability Report</i>.</p> <p>Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan dan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.</p>
10.	Agnes Yunia Putri Simon, Agus Satrya Wibowo dan Rosel Rosel (2022)	Pengaruh Penerapan <i>Green Accounting</i> Terhadap Kinerja Keuangan Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada	<i>Green financing</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan seiring dengan <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh pula terhadap kinerja keuangan sedangkan berperan sebagai mederasi untuk memperkuat	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>Green financing</i> dan <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada perusahaan Sektor</p>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)	hubungan antara akuntansi hijau dengan kinerja keuangan.	Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.
11.	Agnes Mitra Bangun, Tri Astuti dan Indra Satria (2024)	Pengaruh <i>Green Intellectual Capital</i> , <i>Green Accounting</i> dan <i>Firm Size</i> Terhadap Kinerja Keuangan Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi	<i>Green intellectual capital</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan <i>green accounting</i> berpengaruh negatif dan <i>firm size</i> memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. GCG dengan proksi dewan komisaris independent mampu memoderasi hubungan <i>green intellectual capital</i> terhadap kinerja keuangan.	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>Green financing</i> dan <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian sampel SRI-KEHATI yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2022.</p>
12.	Endang Ruhayat, Muhammad Erick Kurniawan (2024)	Pengaruh <i>Green Accounting</i> , Struktur Modal dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keuangan Dengan <i>Good Corporate</i>	Parsial akuntansi hijau dan struktur modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan analisis regresi <i>good corporate governance</i> tidak	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>Green Accounting</i> atau <i>financing</i> dan <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Perbedaan : Peneliti ini</p>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<i>Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi	mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.	melakukan penelitian 100 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022
13.	Almira Naswa Qolam (2025)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Green Accounting</i> Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<i>Good corporate governance</i> yang diukur menggunakan dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh, berbeda dengan pengukuran menggunakan dewan direksi yang dinyatakan berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan <i>green accounting</i> berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> .	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>Green Accounting</i> atau <i>financing</i> dan <i>good corporate governance</i> . Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
14.	Anita Jessica Gunawan (2023)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Value of The Firm</i> Dengan <i>Cost of Capital</i> Sebagai Variabel Intervening	Komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh. Variabel biaya modal berpengaruh positif terhadap	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>corporate governance</i> atau <i>good corporate governance</i> Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<p>nilai perusahaan. sebaliknya, variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap biaya modal. Begitu pula dengan variabel biaya tidak berpengaruh terhadap efek mediasi pada hubungan antara tata kelola perusahaan dengan nilai perusahaan.</p>	<p>terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.</p>
15.	<p>Marlene dan Yunieta Anny Nainggolan (2025)</p>	<p><i>Unveiling The Impact of Green Financing and Sustainability Reporting on Indonesia Banks : Two-Fold Analysis using Tobins'Q and RoRWA</i></p>	<p>Pentingnya menelaraskan transparansi SRD dan pelaksanaan GF untuk mempercepat pelaporan berbasis taksonomi baru, mengembangkan metrik ESG yang terkait dengan RoRWA dan mengeksplorasi potensi insentif makro dan mikro-prudensial.</p>	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>green financing</i> dan <i>sustainability reporting</i>.</p> <p>Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada 44 bank umum yang terdaftar di BEI dari tahun 2021-2023.</p>
16.	<p>Elias Appiah Kubi, Francisca Omama</p>	<p><i>Green Financing and Sustainability Reporting</i></p>	<p>Efek pembiayaan hijau pada pelaporan keberlanjutan</p>	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>green</i></p>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Koranteng, Codruta Cornelia Dura, Alin Adrian Mihaila, Imola Driga dan Ana Preda (2024)	<i>Among SMEs : The Role of Pro-Environmental Behavior and Digitization</i>	menjadi positif dan signifikan. Perilaku pro-lingkungan terungkap memediasi Sebagian hubungan antara pembiayaan hijau dan pelaporan keberlanjutan. Hubungan antara perilaku pro-lingkungan dan pelaporan keberlanjutan juga ditemukan dimoderasi secara positif oleh digitalisasi.	<i>financing dan sustainability reporting.</i> Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian menggunakan data dari 352 UKM dari ghana dikumpulkan antara mei dan juni 2024.
17.	Margaretha Barung, Aaron MA Simanjuntak, Linda Y Hutadjulu (2018)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Komisaris independen, konsentrasi kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan kepemilikan modal institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i> dan <i>sustainability report</i> . Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada seluruh data keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			laporan keberlanjutan.	
18.	Yaumil Khoiriyah, Pebrina Swissia dan Viga Olivia (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Karakteristik Perusahaan Terhadap <i>Sustainability Report</i>	Variabel ukuran komite audit, dewan direksi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> . Sedangkan untuk variabel <i>governance committee</i> , <i>leverage</i> , <i>likuiditas</i> dan <i>profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability Report</i> .	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i> dan <i>sustainability report</i> . Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
19.	Galih Pratiwi (2025)	Pengaruh <i>Green Accounting</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Modal Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023)	Akuntansi hijau, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan struktur modal berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan secara simultan, variabel akuntansi hijau, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan struktur modal bersama-sama	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>green accounting</i> atau <i>green financing</i> , <i>good corporate governance</i> dan <i>sustainability report</i> . Perbedaan : Peneliti ini melakukan penelitian pada periode tahun 2019-2023 pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan.	
20.	Yenny Purbandari dan Ratna Suryani (2018)	<i>Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Reporting</i>	Dewan direksi berpengaruh terhadap pelaporan keberlanjutan. Kedua komite audit berpengaruh terhadap pelaporan keberlanjutan juga.	<p>Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i> dan <i>sustainability reporting</i>.</p> <p>Perbedaan : perusahaan yang menerbitkan pelaporan keberlanjutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2027.</p>

Sumber : Jurnal terpublikasi yang telah diolah oleh penulis

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya manajemen atau investor melakukan pelaporan keberlanjutan berdasarkan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola perusahaannya dan bertanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Green Financing* muncul sebagai salah satu unsur yang memiliki kontribusi besar bagi perusahaan dalam sektor energi sebagai salah satu sumber pendanaan. Selain itu, *good corporate governance* adalah salah satu unsur dalam laporan keberlanjutan. Dengan adanya

GCG dapat meningkatkan kredibilitas dan *value* perusahaan di mata publik. Dengan adanya budaya organisasi dapat menilai karakteristik dan perilaku yang terdapat di perusahaan dan dapat melakukan evaluasi jika ada kekurangan atau kesalahan dari budaya perusahaan tersebut agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

2.2.1 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas *Sustainability Report*

Laporan keberlanjutan merupakan hasil dari kebiasaan atau budaya perusahaan. Jika didalam perusahaan terdapat nilai budaya dalam aspek sosial, lingkungan dan ekonomi, mereka cenderung membuat proses administrasi termasuk pelaporan keberlanjutan. Perusahaan memberikan laporan keberlanjutan sebagai kesatuan dengan budaya dan keinginan perusahaan. Laporan keberlanjutan merupakan dari bagian perencanaan strategis. Perusahaan memiliki rancangan untuk melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan memberikan saran terkait kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi. Dalam hal ini, *sustainability report* menghasilkan data dan informasi tentang kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi pemangku kepentingan eksternal. *Sustainability report* memainkan peran penting dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh investor. Investor dapat menggunakan data dan informasi terkait kinerja perusahaan sebagai dasar dalam membuat keputusan investasi dengan

mengakses laporan keberlanjutan sebagai data tambahan dalam melakukan penilaiannya. (Atika & Simamora, 2024)

Menurut Ardhia et al. (2024) didalam penelitiannya menjelaskan bahwa :

“Budaya perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. karena budaya yang baik yang mengakar dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan karena budaya tersebut terdiri dari nilai, sistem dan standar yang membentuk perilaku dan mekanisme di dalam perusahaan”.

Menurut Atika & Simamora (2024) didalam penelitiannya memaparkan bahwa :

“Budaya hierarki dan budaya pasar memiliki efek positif pada kualitas laporan keberlanjutan. karena mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang ketat dan memberikan informasi tentang kinerja perusahaan ke pihak eksternal. Karena kualitas pelaporannya berasal dari kepatuhan terhadap aturan dan standar sehingga memberikan laporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi”.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak positif terhadap Kualitas *Sustainability Report*.

2.2.2 Pengaruh *Green Financing* Terhadap Kualitas *Sustainability Report*

Keuangan hijau diyakini dapat menjadi solusi bagi keberlangsungan lingkungan. Tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan di terbitkannya peraturan OJK No 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga jasa keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik untuk memperjelas penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Pembiayaan hijau berdasar pada investasi dan pembangunan ramah lingkungan yang memfokuskan pada berkelanjutan. Dimasa sekarang pemanfaat teknologi sangat signifikan hampir

semua sektor usaha menggunakan teknologi yang terus berkembang sehingga menghasilkan dampak bagi keberlanjutan masyarakat dan perekonomiannya. Keuangan hijau menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Secara global yaitu membahas pembangunan tetapi memikirkan dampaknya terhadap lingkungan agar adanya kesinambungan ekologis. Itulah sebabnya banyak perusahaan yang berinvestasi ke obligasi hijau atau *green bonds*. (Hasanah & Hariyono, 2022)

Menurut Kubi et al. (2024) didalam penelitiannya memaparkan bahwa :

“Efek pembiayaan hijau pada pelaporan keberlanjutan menjadi positif dan signifikan. Pembiayaan hijau yang dilakukan oleh bank, emiten dan perusahaan publik dalam membantu pembangunan yang signifikan dan tetap memperhatikan kondisi alam. Hal tersebut dapat menjadi nilai tambah dalam laporan keberlanjutan. semakin baik penggunaan pembiayaan hijau untuk pembangunan berkelanjutan maka semakin baik juga laporan keberlanjutannya”.

Menurut Galih (2025) didalam penelitiannya menjelaskan bahwa :

“Akuntansi hijau berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Akuntansi hijau merupakan dasar dari pembiayaan hijau yang didalamnya membahas mengenai pengukuran, pencatatan dan mengungkap dampak lingkungan, semakin baik akuntansi hijau maka semakin tinggi juga kredibilitas laporan keberlanjutan”.

Menurut Marlene & Nainggolan (2025) didalam penelitian membahas secara jelas bahwa :

“Adanya keselarasan transparansi SRD dan pelaksanaan GF untuk mempercepat pelaporan berbasis taksonomi baru. *Green financing* umumnya memberikan syarat laporan dampak lingkungan agar mendorong perusahaan membuat laporan keberlanjutan. *Green financing* tidak hanya membiayai tetapi memperhatikan dampaknya berbanding lurus dengan laporan keberlanjutan. jadi jika *green financing*nya baik maka laporan keberlanjutannya juga baik”.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas ditemukan bahwa *Green Financing* berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*.

2.2.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas *Sustainability Report*

Penerapan *Good Corporate Governance* menciptakan adanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang tentram. Oleh sebab itu, diadakannya *good corporate governance* oleh perusahaan yang ada di Indonesia sangat penting dalam menopang keberlangsungan dan kestabilan ekonomi yang mencakup keseluruhan perusahaan. menciptakan adanya pemanfaatan dan memunculkan sikap kemandirian dari tiap divisi perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Investor. Dewan direksi memiliki tugas sebagai orang yang memiliki tanggungjawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Dalam rangka mempertahankan kestabilan perusahaan, dewan direksi harus memenuhi tanggungjawab sosial dari perusahaannya. (Purbandari & Suryani, 2018)

Sustainability report sudah menjadi komponen yang penting bagi perusahaan dalam memberikan informasi mengenai perusahaannya dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya. Oleh karena itu, *sustainability report* merupakan sebuah laporan yang didalamnya berisi mengenai tentang operasional perusahaan mengenai tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berguna sebagai nilai tambah perusahaan dimata publik dan dapat menjadi

acuan bagi investor yang ingin melakukan investasi di perusahaannya. (Dewi & Pitriasari, 2019)

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan penelitian untuk membuktikan bahwa ada pengaruh positif dari *good corporate governance* terhadap kualitas *sustainability report* adalah sebagai berikut.

Menurut Purbandari & Suryani (2018) didalam penelitiannya memaparkan bahwa :

“Dewan direksi sebagai bagian dari *good corporate governance* berpengaruh terhadap *sustainability report*. Maka dari itu semakin baik dalam melakukan pengelolaan perusahaan maka semakin baik juga laporan *sustainability reportnya*”.

Menurut Khoiriyah et al. (2020) didalam penelitiannya menjelaskan bahwa :

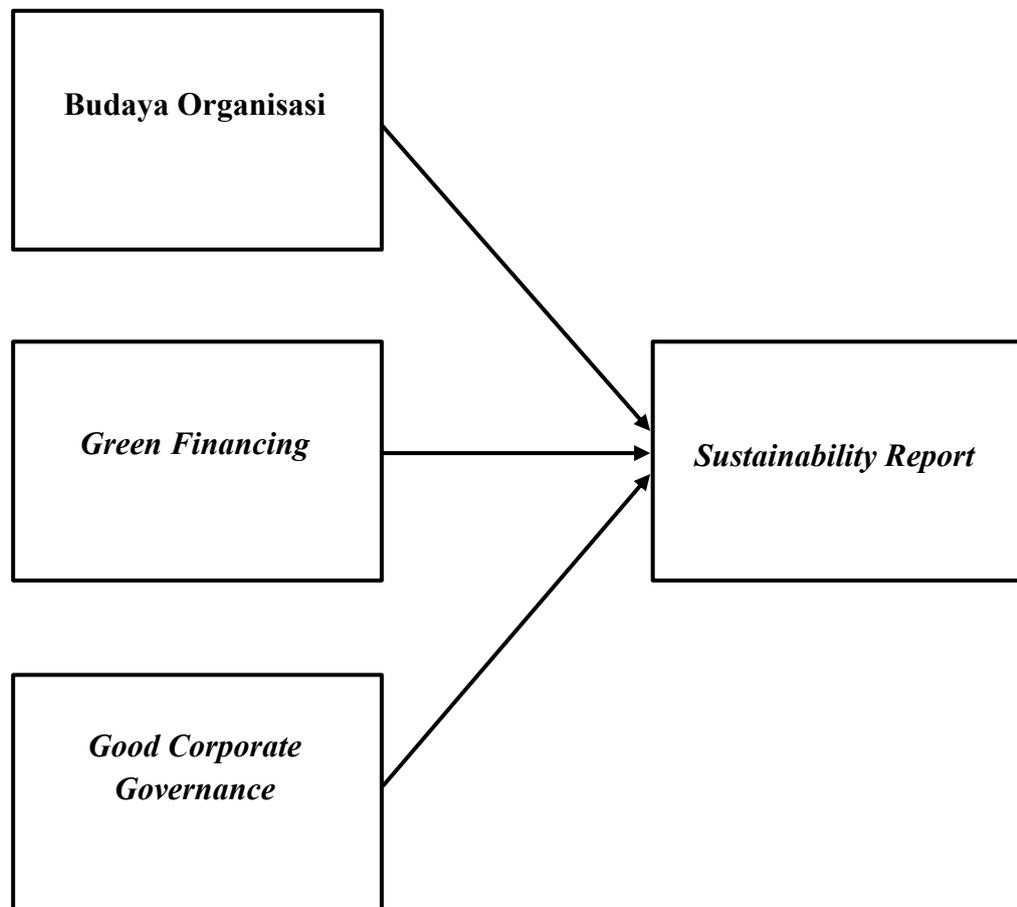
“Dewan direksi berpengaruh terhadap *sustainability report*. Orang yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dalam menjalankan tugas yaitu bertanggung jawab terkait kondisi lingkungan dan sosial perusahaan maka akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam laporan keberlanjutan”.

Menurut Barung et al. (2018) didalam penelitiannya memberikan hasil bahwa :

“Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Komisaris independen bagian dari *good corporate governance* yang mendorong pengungkapan *sustainability report*. Semakin baik pengungkapan yang dilakukan komisaris independen maka pengungkapan informasi *sustainability report* semakin luas”.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas ditemukan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Budaya Organisasi, *Green Financing* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas *Sustainability Report*”. Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Maka model kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Sumber : Data diolah oleh penulis

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2023:99–100) menjelaskan pengertian dari hipotesis yaitu : “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Penulis ingin mengasumsikan jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*

Hipotesis 2 : *Green Financing* berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*

Hipotesis 3 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kualitas *Sustainability Report*